

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PENDIDIKAN  
NASIONAL DALAM MENANAMKAN IDEOLOGI PANCASILA  
(Penelitian di SDN 104212 Kecamatan Patumbak Kabupaten  
Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**VINI ARGIAN TI  
218520029**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/3/26

Access From (repository.uma.ac.id)4/3/26

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PENDIDIKAN  
NASIONAL DALAM MENANAMKAN IDEOLOGI PANCASILA  
(Penelitian di SDN 104212 Kecamatan Patumbak Kabupaten  
Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area



**OLEH:  
VINI ARGIANI  
218520029**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN 2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/3/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/3/26

## LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : VINI ARGIAN TI

NPM : 218520029

JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PENDIDIKAN  
NASIONAL, DALAM MENANAMKAN IDEOLOGI  
PANCASILA ( Penelitian di SDN 104212 Kecamatan Patumbak  
Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara)



Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing

Dr. Drs. Indra Muda, M.AP

Mengetahui :



Dr. Walid Mustafa, S, Sos, M.I.P



Dr. Drs. Indra Muda, M.AP

Tanggal Lulus : 23 Juli 2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/3/26

Access From (repository.uma.ac.id)4/3/26

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juni 2025



Vini Argianti

218520029

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan  
dibawah ini :

Nama : Vini Argianti  
Npm : 218520029  
Program Studi : Administrasi publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan Ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada  
Universitas Medan Area. Hak Bebas Royalti Noneksklusif ( *Non-Exclusive  
Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “ Implementasi  
Kebijakan Standar Pendidikan Nasional Dalam Menanamkan Ideologi Pancasila  
(Penelitian di SDN 10412 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi  
Sumatera Utara)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak  
menyimpan mengalihkan/media format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan  
data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/ skripsi/tesis saya  
selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai  
pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebelumnya.

Medan, Juni 2025



**Vini Argianti**  
**218520029**

## ABSTRAK

Implementasi kebijakan standar pendidikan nasional dalam menanamkan ideologi pancasila sesuai dengan peraturan pemerintah No.4 Tahun 2022 tentang standar nasional pendidikan diarahkan untuk dapat memperkuat Identitas nasional agar tidak mudah terpengaruh budaya asing yang dapat mempengaruhi nasionalisme generasi muda. Implementasi kebijakan pendidikan nasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 menjadi pijakan untuk memperkuat pendidikan karakter, termasuk penguatan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi kebijakan tersebut di lapangan serta tantangan yang dihadapi oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yang dilaksanakan di SDN 104212. Dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data, data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru, serta observasi langsung di kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah diterapkan dalam bentuk pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum, masih ada kendala seperti kurangnya pelatihan bagi guru, minimnya fasilitas pendukung, dan perbedaan pemahaman di kalangan tenaga pengajar. Meskipun demikian, terdapat indikasi positif dari peningkatan pemahaman siswa terhadap Pancasila, yang tercermin dalam perilaku dan sikap mereka sehari-hari. Penelitian ini memberikan gambaran penting tentang bagaimana kebijakan nasional diimplementasikan di tingkat sekolah dasar serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan ideologi Pancasila dalam pendidikan di masa depan.

**Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Ideologi, Pancasila, Patumbak.**

## ABSTRACT

*The implementation of the national education standards policy in instilling the Pancasila ideology in accordance with government regulation No. 4 of 2022 concerning national education standards is aimed at strengthening national identity so that it is not easily influenced by foreign culture which can influence the nationalism of the younger generation. Implementation of the national education policy in Government Regulation Number 4 of 2022 is the basis for strengthening character education, including strengthening Pancasila values in schools. This research aims to identify how the policy is implemented in the field and the challenges faced by educators in the learning process. This research uses a qualitative approach with data collection methods carried out at SDN 104212. With a qualitative approach and data collection methods, data is collected through interviews with school principals, teachers, as well as direct observation in the classroom. The research results show that even though policies have been implemented in the form of integrating Pancasila values in the curriculum, there are still obstacles such as lack of training for teachers, lack of supporting facilities, and differences in understanding among teaching staff. However, there are positive indications of increasing students' understanding of Pancasila, which is reflected in their daily behavior and attitudes. This research provides an important overview of how national policies are implemented at the elementary school level and provides recommendations for increasing the effectiveness of implementing the Pancasila ideology in education in the future.*

**Keywords:** *Implementation, Policy, Ideology, Pancasila, Patumbak.*

## Riwayat Hidup

Penulis dilahirkan di Marindal II pada tanggal 19 Agustus 2002 dari Ayah Paimun Agung dan Ibu Andri wahyuni. Penulis merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara.

Tahun 2020 penulis lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA), pada tahun 2021 Penulis terdaftar menjadi mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Piliti Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis mengikuti organisasi internal program studi yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HIMAP) dan mendapatkan wewenang sebagai anggota pada bidang (PPK).

Tahun 2023 penulis lulus dalam program Kampus Merdeka yaitu Kampus Mengajar Batch 6 dan pada tahun 2024 penulis lulus pada program Kampus Magang di perusahaan BTPN Syariah sebagai posisi (ADS).



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunianya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih peneliti ialah mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah dengan judul **“Implementasi Kebijakan Standar Pendidikan Nasional Dalam Menanamkan Ideologi Pancasila (Penelitian di SDN 104212 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara)”**.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Si selaku rektor Universitas Medan Area, Bapak Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M. IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Bapak Dr. Drs. Indra Muda, M. A P selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik sekaligus sebagai pemimbing skripsi saya yang membantu saya sampai tahap ini, Ayah serta Ibu saya tercinta yang telah memberikan segala hal bagi saya selama ini, Mbak serta Abang yang setelah memberikan bantuan finansial kepada penulis, dan kepada rekan saya yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk terus berjuang selama skripsi an ini berlangsung.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, Maret 2025



Vini Argianti

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
2.1 Implementasi .....	7
2.1.1 Teori Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III.....	8
2.2 Kebijakan Publik.....	11
2.3 Ideologi Pancasila .....	14
2.4 Peran Guru Dalam Penanaman Ideologi Pancasila.....	22
2.5 Penelitian Yang Relevan .....	26
2.6 Kerangka Pemikiran.....	29
<b>III METODE PENELITIAN</b> .....	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Lokasi Penelitian.....	33
3.3 Waktu Penelitian .....	33
3.4 Informan Penelitian.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6 Teknik Analisa Data.....	37
<b>IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	40
4.1 Hasil Penelitian .....	40
4.1.1 Gambaran Umum SDN 104212 Kecamatan Patumbak .....	40
4.1.2 Guru dan Tenaga Kependidikan.....	41
4.1.3 Visi, Misi, dan Tujuan SDN 104212.....	43
4.1.4 Struktur Organisasi SDN 104212 .....	46
4.1.5 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi di SDN 104212 .....	46
4.2 Pembahasan.....	49
4.2.1 Implementasi Kebijakan Standar Pendidikan Nasional Dalam Menanamkan Ideologi Pancasila di SDN 104212 .....	49
4.2.2 Faktor Penghambat Implementasi Pancasila.....	64
<b>V SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	67
5.1 Simpulan.....	67
5.2 Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	69
<b>LAMPIRAN</b> .....	72

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penelitian Relevan.....	26
Tabel 2. Waktu Penelitian.....	34
Tabel 3. Sarana dan Prasarana .....	40
Tabel 4. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	41
Tabel 5. Jumlah Peserta Didik .....	43



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 2. Struktur Organisasi.....	46
Gambar 3. Kegiatan 3S(Senyum, Salam, Sapa).....	51
Gambar 4. Kegiatan Market Day di SDN 104212 .....	52
Gambar 5. Kegiatan <i>Paintting</i> Kelas V.....	52
Gambar 6. Tempelan berupa sila-sila Pancasila .....	53
Gambar 7. Kegiatan P5 Dalam Kegiatan Keagamaan .....	55



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Era globalisasi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila mengalami kemunduran dan sering kali terancam oleh pengaruh budaya asing yang masif. Hal itu mengakibatkan Anak-anak pada sekolah dasar mudah terpengaruh oleh budaya asing yang sering kali memiliki nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk lebih meningkatkan pendidikan di Indonesia serta lebih menekankan pentingnya Pancasila sebagai identitas nasional. Besarnya pengaruh teknologi dan komunikasi yang berkembang secara pesat ditandai juga dengan terjadinya disrupsi pada bidang pendidikan. Akses jejaring sosial yang luas dan mudah dijangkau oleh siapapun mengakibatkan terjadinya pergeseran moral dan budaya utamanya bagi anak muda.

Penanaman nilai-nilai Pancasila pada sekolah dasar sangat penting untuk mewujudkan bangsa yang cerdas, inovatif, dan berakhlak mulia. Berdasarkan peraturan pemerintah no.4 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no.57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan dalam Pasal 1 Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tercantum pada pasal 6 ayat 1 yang berbunyi standar Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar difokuskan pada:

- a. persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
- b. penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
- c. penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi Peserta Didik untuk mengikuti Pendidikan lebih lanjut.

Negara harus melibatkan dukungan pemerintah untuk dapat memperbaiki dan menciptakan pendidikan yang berkualitas untuk pelajaran peningkatan pemahaman pancasila yang baik bagi anak-anak termasuk dalam usia dini hingga orientasi masyarakat dapat memantau kehidupan di suatu lembaga dan orang-orang di sekitar lingkungan sekolah. Ketika sekolah memiliki sarana atau prasarana yang mendukung kegiatan belajar siswa dengan aman, diharapkan siswa berprestasi secara akademis. bangunan di dalam kelas dan proses pembelajaran harus dilakukan dengan cara yang praktis, agar siswa belajar dan mengamalkan kedisiplinan yang membentuk perhitungan siswa menjadi aturan yang disiplin dan taat (Pebriani et al., 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu komponen utama dalam SNP adalah penguatan pendidikan karakter melalui penanaman nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter, termasuk pemahaman ideologi Pancasila, menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan. Melalui implementasi SNP, pemerintah berupaya menciptakan sekolah yang tidak hanya mencetak siswa yang cerdas, tetapi juga berkarakter dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang Pancasila.

Namun, meskipun kebijakan tersebut sudah ada, implementasi di lapangan seringkali menemui berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah, khususnya di tingkat dasar. Banyak sekolah yang masih kesulitan untuk menjadikan Pancasila sebagai bagian yang integral dalam kurikulum dan aktivitas pembelajaran sehari-hari. Hal ini menjadi masalah yang signifikan karena ideologi Pancasila harus tertanam dengan baik sejak dini untuk membentuk karakter bangsa di masa depan.

Implementasi nilai-nilai Pancasila di SD Negeri 104212 dapat dilihat dalam berbagai kegiatan pembelajaran, terutama melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya adalah kurangnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Sehingga hal itu dapat menghambat pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila. Selain itu, pengaruh negatif dari media sosial dan budaya populer yang berkembang pesat seringkali bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa, mengingat banyak siswa yang belum bisa membedakan mana konten yang baik dan buruk. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penguatan nilai-nilai Pancasila, tidak hanya melalui materi pembelajaran tetapi juga melalui kebiasaan sehari-hari yang dijalankan oleh semua pihak di lingkungan sekolah.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana implementasi kebijakan standar pendidikan nasional terutama mengenai nilai-nilai Pancasila di SD Negeri 104212, di tengah pengaruh

globalisasi yang kuat, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, baik dari segi pengajaran, interaksi sosial siswa, maupun pengaruh eksternal seperti media sosial dan budaya asing.

## 1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah untuk memudahkan penulis dalam penyelesaian penelitian yang dilakukan agar penelitian ini nantinya memiliki arah yang jelas dalam interpretasi fakta yang diberikan secara tertulis. Berdasarkan uraian konteks masalah diatas, penulis merumuskan masalah pokok penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan standar pendidikan nasional dalam menanamkan ideologi pancasila berdasarkan pp nomor 4 Tahun 2022 di SDN 104212?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan standar pendidikan nasional dalam menanamkan ideologi pancasila berdasarkan pp nomor 4 Tahun 2022 di SDN 104212?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan yang jelas dan spesifik mengenai apa yang ingin dicapai melalui suatu penelitian. Tujuan ini berfungsi sebagai panduan dalam proses penelitian, membantu peneliti untuk fokus pada masalah yang sedang diteliti dan mengarahkan metode serta analisis yang akan digunakan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan standar pendidikan nasional dalam pp nomor 4 tahun 2022 dalam menanamkan ideologi pancasila bagi pelajar di SDN 104212.



2. Untuk mengetahui Apa saja faktor-faktor penghambat dalam Implementasi kebijakan standar pendidikan nasional dalam pp nomor 4 tahun 2022 dalam menanamkan pemahaman ideologi pancasila bagi pelajar di SDN 104212.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pendidikan, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan nasional yang berbasis pada ideologi Pancasila. Hal ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana peraturan pemerintah diterapkan di tingkat sekolah dasar dalam membentuk karakter dan ideologi Pancasila pada generasi muda.
  - b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan anak sekolah dasar , yaitu membuat inovasi penggunaan metode eksperimen dalam kemampuan berpikir dan berperilaku sesuai dengan sila-sila dalam pancasila.
  - c. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan ataupun acuan bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktis
  - a. Penelitian ini dapat menjadi alat evaluasi bagi pengelola pendidikan di SDN 104212 untuk menilai sejauh mana Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini memungkinkan adanya perbaikan atau penyesuaian kebijakan agar tujuan penanaman ideologi Pancasila tercapai dengan optimal.

- b. Hasil penelitian ini juga nantinya dapat dijadikan koleksi serta inspirasi bagi perpustakaan universitas medan area dan menjadi referensi bagi mahasiswa dan masyarakat umum.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Implementasi

Implementasi sering kali diartikan sebagai penerapan atau penegakan suatu kebijakan yang dirumuskan oleh pengambil keputusan. Oleh karena itu, pengambil keputusan harus mempertimbangkan keputusan yang diambil berdasarkan kewenangan pejabat untuk melaksanakan dan menerima keputusan tersebut. Langkah-langkah yang lebih panjang dalam proses kebijakan bergantung pada implementasi itu sendiri. Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan (*policy making process*). Seperti dinyatakan Hasbullah (2015), bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, dimana aktivitas politis ini dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung satu sama lainnya, diatur menurut urutan waktu, seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Wahab (2008) mengatakan bahwa:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

### 2.1.1 Teori Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III

George Edward III (dalam Subarsono (2005: 90) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Menurut George Edward III terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan Muda (2019: 127) yaitu:

a. Komunikasi (*Communication*).

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu komunikator ke komunikator lainnya. Sedangkan komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pengambil kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi harus disampaikan kepada aktor politik agar mereka memahami isi, tujuan, arah dan kelompok sasaran kebijakan, sehingga aktor politik dapat mempersiapkan apa yang harus dilakukan. kaitannya dengan implementasi kebijakan, sehingga proses implementasi kebijakan dapat dikembangkan secara efektif dan sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan.

Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan- ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan- ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber- sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya yang ada di sini terkait dengan semua sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik pelaksana kebijakan disebut disposisi. Penyajian memegang peranan penting dalam realisasi kebijakan sesuai dengan maksud atau tujuannya. Ciri penting yang harus ada pada diri para pelaksana kebijakan adalah kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran memotivasi para pelaksana untuk tetap berpegang pada program yang telah dilaksanakan, sedangkan komitmen yang tinggi dari para pelaksana kebijakan akan selalu membuat mereka bersemangat dalam melaksanakannya. Seperti melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap para pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Jika pelaksana mempunyai sikap yang baik, maka ia akan mampu melaksanakan kebijakan sesuai keinginan pembuat kebijakan. Sebaliknya jika sikap mereka tidak baik, maka pelaksanaannya tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini mencakup dua hal, yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanismenya; Dalam melaksanakan kebijakan biasanya dibuat standar operasional prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap pelaksana untuk bertindak agar pelaksanaan kebijakan konsisten dengan maksud dan tujuan kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, yaitu struktur Birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi cenderung melemahkan kontrol sehingga membuat prosedur birokrasi menjadi rumit, yang pada akhirnya membuat aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Winarno, 2008) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan- pelayanan publik. Struktur Birokrasi terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi: SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite- komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

## 2.2 Kebijakan Publik

Dalam konteks organisasi dan manajemen publik atau pemerintahan, suatu lembaga pemerintah mempunyai kekuasaan dan kewajiban menyelenggarakan pemerintahan dalam kegiatan mengatur (*goverri*), mengurus (*manage*), membimbing (*guide*), pembinaan atau membangun (*development*), mendidik (*educated*) dan melayani (*service*) pada berbagai pemerintahan. permasalahan yang menyangkut kepentingan dan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Penerapan otoritas dan kewajiban pemerintah ini pada dasarnya berasal dari fungsi kelembagaan atau organisasi dan manajemen atau organisasi dan manajemen publik pemerintahan.

Kebijakan publik itu pada hakikatnya merupakan suatu aktivitas yang khas (*a unique activity*), yang dalam artiannya ialah ia mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesai, dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka. David Easton dalam Madani (2011: 65), “menyebutnya sebagai orang-orang yang memiliki otoritas (*publi, authorities*) dalam sistem politik”.

Kebijakan menurut Anderson menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan sejumlah aktor dalam mengatasi masalah atau sesuai fokus persoalan. Kebijakan berkenaan dengan badan atau lembaga, masalah, keputusan, tindakan, aktor, dan lain sebagainya. Bahkan menurut Eulau dan Prewitt (Jones, 2001: 48–49) bahwa ada beberapa komponen kebijakan yaitu:

1. Niat
2. Tujuan (*goals*),

3. Rencana atau usaha (*plan or proposal*),
4. Program (*programme*),
5. Keputusan atau pilihan (*decisions or choise*) dan
6. Pengaruh (*effect*).

Kebijakan adalah keputusan permanen yang ditandai dengan perilaku yang konsisten dan representatif dari pihak-pihak yang terlihat membuat dan siapa yang melaksanakannya. Keputusan pada dasarnya sebagai serangkaian keputusan bersama permasalahan terikat yang ditentukan oleh aktor dan praktisi pemerintah serta lembaga lain yang terikat dengan tujuan dipertahankan dan juga sarana. Untuk mencapai batas-batas kewenangan aktor tersebut. Kebijakan dapat dibedakan dari tujuan kebijakan, maksud kebijakan dan pilihan kebijakan yang mempunyai erat kaitannya dengan dengan komponen kebijakan publik, yaitu : Maksud, tujuan, rencana atau proposal, program, putusan atau pilihan dan pengaruh.

Menurut Thomas R Dye dalam buku Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang, yang ditulis oleh Dwidjowijoto (2006) mendefinisikan bahwa definisi kebijakan publik dapat dijkaskan sebagai berikut: “ *Public Policy as anything a government choses to do or not to do* “ (Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan esuatu). Formulasi kebijakan publik sangat sederhana dan mengandung muatan konseptualisasi kebijakan publik. Ini menunjukkan bahwa kebijakan publik setiap aspek perilaku pemerintahan dalam memperjuangkan, meningkatkan dan memperbaiki berbagai aspek kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



James E Anderson berpendapat bahwa “ *Public policy a those policies developed by government bodies and official* “ (Kebijakan publik adalah kebijakan - kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah) Pada prinsipnya pandangan James E. Anderson tersebut, bahwa kebijakan publik dikembangkan adanya aktor-aktor dan aktor-aktor pejabat publik yang menyatakan kebijakan publik adanya masalah kebijakan atau materi kebijakan publik, sehingga setiap keputusan kebijakan terkait dengan aktor kebijakan dan selalu adanya multi kebijakan yang ditetapkan melalui pembuat kebijakan dalam badan atau lembaga publik atau pemerintahan. Kebijakan publik menurut Anderson memiliki beberapa elemen dan karakteristik kebijakan publik. Elemen kebijakan publik diantaranya yaitu:

1. Kebijakan publik mempunyai tujuan;
2. Kebijakan publik berisi tindakan pejabat pemerintah;
3. Kebijakan publik bersifat positif dan negatif;
4. Kebijakan publik yang dilakukan pemerintah untuk kebenaran;
5. Kebijakan publik selalu berdasarkan peraturan
6. perundang-undangan

Pandangan Dunn (2003) bahwa kebijakan public adalah serangkaian pilihan tindakan – tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan yang menyangkut kepentingan kehidupan masyarakat. Kebijakan publik dapat juga merupakan serangkaian pilihan yang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan publik atau lembaga - lembaga pemerintah, diformulasikan dalam bidang isu (*issue areas*) yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang di

dalamnya terkandung konflik diantara kelompok.

### 2.3 Ideologi Pancasila

Pancasila adalah dasar ideologi pemerintahan Indonesia. Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia. Nama ini berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu "pañca" yang berarti lima, dan "sīla" yang berarti prinsip atau dasar. Pancasila adalah kumpulan prinsip yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mencakup lima pokok ajaran yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang pertama kali diproklamkan pada 1 Juni 1945, dan diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Proses munculnya Pancasila tidak terjadi dalam waktu singkat, melainkan melalui perjalanan yang panjang dalam perumusannya, serta mengalami berbagai perubahan dalam penetapannya. Hal ini karena para tokoh perjuangan berkeinginan agar negara Indonesia memiliki dasar, ideologi, dan pedoman yang kuat sebagai acuan dalam membangun negara.

Penetapan hari lahir pancasila merujuk pada sidang Badan Penyelidik Usaha- usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada saat itu, tiga tokoh yang menyampaikan pandangannya mengenai dasar negara adalah Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

Pada 29 Mei, Mohammad Yamin mendapatkan giliran pertama untuk menyampaikan pidato mengenai lima prinsip yang diusulkan sebagai dasar negara Indonesia, yaitu: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat. Setelah pidato tersebut, Mohammad Yamin menulis rancangan Undang Undang Dasar Republik Indonesia yang mencakup

kelima asas dasar negara, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan Persatuan Indonesia, Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pada sidang BPUPKI yang berlangsung dua hari setelahnya, Soepomo mengemukakan pemikirannya mengenai asas dasar negara Indonesia, yang meliputi: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat.

Keesokan harinya, giliran Soekarno untuk menyampaikan pidatonya mengenai dasar negara, yang terdiri dari: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang maha esa. Usulan lima dasar negara versi Soekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah Pancasila. Peristiwa ini menjadi landasan untuk penetapan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 1945. Namun, proses selanjutnya masih berlanjut, yakni dengan disusunnya Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada 22 Juni 1945, serta penetapan Undang-Undang Dasar yang juga mengesahkan Pancasila pada 18 Agustus 1945. Dalam pidato tersebut, Soekarno pertama kali mengemukakan konsep dan rumusan awal "Pancasila" sebagai dasar negara Indonesia.

Pada 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat kesempatan untuk menyampaikan pemikirannya mengenai dasar negara Indonesia merdeka, yang ia sebut "Pancasila". Pidato yang disampaikan tanpa persiapan tertulis tersebut diterima dengan aklamasi oleh seluruh anggota Dokuritsu Junbi Cosakai. Selanjutnya, Dokuritsu Junbi Cosakai membentuk sebuah Panitia Kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan pidato yang

disampaikan oleh Bung Karno. Panitia Sembilan dibentuk, yang terdiri dari Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin. Tugas mereka adalah merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, serta menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir pada 1 Juni 1945 melalui pemikiran Mohammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno. Pancasila kemudian dijadikan sebagai dasar negara sekaligus ideologi kebangsaan bagi rakyat Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila tidak lahir tanpa makna; setiap butirnya mengandung arti yang mendalam, sehingga kelima sila tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan dasar negara.

Pancasila lahir dari tradisi budaya yang telah tercipta sejak zaman dahulu. Secara kebetulan nilai-nilai tersebut lahir dan menjadi budaya nenek moyang kita. Nilai-nilai Pancasila menunjang nilai-nilai seluruh aspek masyarakat Indonesia. Ideologi Pancasila merupakan ideologi utama pemerintahan Indonesia. Ideologi Pancasila berarti ideologi yang dijadikan dasar ketertiban pemerintahan dan tujuan pemerintahan. Ideologi Bangsa Indonesia memuat dan menyatukan perbedaan-perbedaan yang terjadi di Indonesia, seperti perbedaan budaya, perbedaan suku, dan perbedaan keyakinan, keberagaman informasi dan faktor-faktor lain yang menjadikan bangsa Indonesia tetap kuat, membangun kekuatan, kekuatan dan stabilitas.

Pancasila satu-satunya ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Bangsa

Indonesia terdiri dari berbagai agama, suku, ras, bahasa, dan budaya, sehingga memerlukan Pancasila sebagai sarana dalam menyatukan hal tersebut. Oleh sebab itu, seluruh rakyat Indonesia dari anak kecil hingga ke orang dewasa atau orang tua diharapkan mampu menghargai perbedaan yang ada secara dewasa, dan berakhlak. (Yasila & Ulfatun Najicha, 2022) Semua nilai yang terdapat di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga nilai-nilai pada Pancasila tidak bisa dilakukan secara terpisah dalam kehidupan bernegara sebab nilai-nilai Pancasila saling berhubungan disegala aspek kehidupan.

Kehadiran pancasila tidak hanya berupa tekstual, tapi juga hadir untuk memberikan kehidupan yang adil dan setara bagi bangsa agar mampu terhindar dari bahaya radikalisme, terorisme, korupsi dan perilaku separatis lainnya yang ingin memecah belah bangsa. Di era saat ini banyak permasalahan pada anak sekolah dasar yang terjadi di indonesia yang sangat bertentangan dengan pancasila sebagai identitas bangsa ini. Ada empat permasalahan utama bangsa indonesia pada anak sekolah dasar yang saling bertentangan dengan nilai-nilai pancasila yaitu rendahnya toleransi antar suku, agama, dan ras, perundungan (*bullying*) di sekolah, kurangnya rasa kebersamaan dan gotong royong, sikap tidak menghargai aturan dan peraturan sekolah.

#### 1. Rendahnya Toleransi Antar-Suku, Agama, dan Ras

Rendahnya toleransi antar-suku, agama, dan ras di kalangan siswa sekolah dasar bisa jadi isu serius jika tidak ditangani dengan cepat. Anak-anak yang belum mempelajari dan memahami perbedaan sering kali menunjukkan sikap yang eksklusif terhadap teman-teman yang berasal dari latar belakang berbeda. Sebagai contoh, ada siswa yang enggan menjalin pertemanan dengan teman sekelas yang

memiliki agama, suku, atau ras yang berbeda. Situasi ini mengakibatkan adanya kesenjangan sosial di dalam kelas, dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengajarkan pentingnya toleransi antar umat beragama, serta sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam keragaman.

Sikap tidak toleran ini bisa timbul akibat minimnya pengetahuan anak mengenai makna menghargai perbedaan. Tanpa adanya pendidikan atau kebiasaan yang baik di sekolah tentang pentingnya saling menghormati perbedaan, kondisi ini bisa berkepanjangan dan menular ke generasi berikutnya. Pembelajaran yang menghadirkan nilai-nilai Pancasila seharusnya bisa menanamkan semangat toleransi sejak usia dini, sehingga anak-anak menyadari bahwa keberagaman merupakan kekuatan, bukan sesuatu yang harus dipisahkan. Hal ini sangat krusial di tingkat sekolah dasar, di mana anak-anak mulai membangun cara pandang mereka tentang masyarakat dan dunia.

Untuk mengatasi masalah rendahnya toleransi ini, pendekatan yang lebih aktif dalam pendidikan Pancasila di sekolah sangatlah penting. Para guru dan pendidik perlu memberikan contoh yang jelas tentang cara menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang melibatkan kolaborasi antara siswa dari berbagai latar belakang, seperti proyek kelompok atau acara bersama, dapat menjadi cara yang efektif untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai. Dengan demikian, sekolah dasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk membentuk karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, seperti toleransi, persatuan, dan saling menghormati dalam keberagaman.

## 2. Perundungan (Bullying) di Sekolah

Perundungan di tingkat sekolah dasar merupakan isu serius yang bisa mengganggu pertumbuhan emosional dan sosial anak. Tindakan bully sering kali muncul dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, atau sosial, seperti cemoohan, penghinaan, atau pengucilan terhadap teman sekelas yang dianggap berbeda. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila, khususnya sila kedua yang menekankan pentingnya menghormati orang lain dan memperlakukan semua dengan baik. Anak-anak yang menjadi sasaran bullying sering merasa terasing, memiliki rendah diri, dan mengalami kesulitan dalam berinteraksi, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental mereka dalam waktu yang lama.

Sekolah seharusnya berfungsi sebagai lingkungan yang aman dan nyaman bagi setiap siswa untuk belajar dan bertumbuh. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pihak sekolah, terutama para guru dan orang tua, untuk secara aktif memberikan pendidikan kepada anak-anak mengenai bahaya bullying dan mengajarkan mereka nilai-nilai seperti empati, toleransi, serta pentingnya menciptakan kedamaian di antara teman-teman. Jika bullying tidak ditangani dengan cepat, situasi sosial di sekolah dapat menjadi semakin buruk dan menghalangi tercapainya tujuan pendidikan yang mengutamakan saling menghargai dan kerja sama, sesuai dengan ajaran Pancasila.

## 3. Kurangnya Rasa Kebersamaan dan Gotong Royong

Kurangnya rasa kebersamaan dan gotong royong di sekolah dasar dapat menghalangi terbentuknya suasana belajar yang bersahabat dan saling mendukung. Anak-anak yang tidak dididik untuk berkolaborasi, saling mendukung, dan membagi tugas dalam aktivitas sehari-hari di sekolah, cenderung

tumbuh menjadi orang yang kurang peka terhadap kebutuhan teman-teman mereka. Sementara itu, Pancasila mengajarkan nilai-nilai pentingnya kolaborasi dan gotong royong dalam sila keempat, yang berfokus pada Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Ketidakpedulian ini bisa menyebabkan anak-anak mengalami kesulitan saat berkolaborasi di masa depan, baik di dunia pendidikan maupun dalam interaksi sosial.

Dalam pendidikan dasar, sangatlah penting bagi anak-anak untuk memahami arti nilai kebersamaan melalui kegiatan kelompok dan aktivitas yang membutuhkan kerja sama. Saat anak-anak diajarkan untuk saling menghormati, berkolaborasi, dan menangani masalah secara bersama-sama, mereka akan lebih siap menghadapi tantangan di kehidupan yang sesungguhnya. Jika konsep kebersamaan dan saling membantu tidak ditanamkan sejak dini, dapat muncul pola pikir yang cenderung individualis yang bisa berpengaruh negatif di masa mendatang. Oleh karena itu, pendidikan yang fokus pada kolaborasi dan kebersamaan, sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, sangat diperlukan untuk membangun karakter anak yang peka terhadap orang lain dan mampu berkolaborasi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik.

#### 4. Sikap Tidak Menghargai Aturan dan Peraturan Sekolah

Sikap yang tidak menghormati peraturan dan kebijakan sekolah menjadi salah satu hambatan utama dalam menciptakan suasana pendidikan yang teratur serta mendukung perkembangan karakter siswa. Di tingkat sekolah dasar, anak-anak sering kali menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan, contohnya terlambat masuk kelas, tidak mematuhi tata cara berpakaian, atau mengabaikan



ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Namun, prinsip-prinsip Pancasila mengajarkan pentingnya disiplin dan penghormatan terhadap norma-norma yang ada dalam kehidupan bersama. Sila keempat, yang menekankan pentingnya kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah atau perwakilan, menunjukkan betapa pentingnya kehidupan yang teratur dan dihormati, yang seharusnya tercermin dalam setiap aktivitas di sekolah.

Ketidaktaatan terhadap peraturan dapat menimbulkan kekacauan dan mengganggu proses pendidikan. Anak yang tidak menghormati aturan sering kali menciptakan gangguan di kelas dan mengganggu teman-temannya, sehingga lingkungan yang mendukung untuk belajar tidak terwujud. Ini berdampak tidak hanya pada kualitas belajar, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial di antara siswa, yang seharusnya terbentuk lewat saling menghargai dan kerjasama. Oleh karena itu, sangat penting bagi sekolah untuk mengajarkan pentingnya menghormati peraturan sebagai bagian dari pembentukan karakter yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, institusi pendidikan perlu menerapkan sistem yang jelas terkait peraturan yang ada serta memberikan contoh positif melalui tindakan konkret. Para pengajar dan staf sekolah wajib menjadi panutan dalam mengikuti peraturan dan menegakkan disiplin dengan cara yang adil dan konsisten. Di samping itu, pendekatan yang lebih membangun, seperti memberikan penghargaan kepada siswa yang patuh pada aturan dan memberikan mereka kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas yang bermanfaat, dapat memotivasi anak-anak untuk lebih menghargai dan mematuhi peraturan sekolah. Dengan demikian, diharapkan budaya disiplin yang berlandaskan nilai-nilai

Pancasila dapat tumbuh di tengah siswa, sehingga mereka akan mengerti bahwa peraturan bukanlah penghalang, melainkan alat untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif..

#### **2.4 Peran Guru Dalam Penanaman Ideologi Pancasila**

Pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang terjadi antar siswa dan guru dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu dimana tujuan tersebut diantaranya dapat mengubah Belajar pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang berlangsung antara siswa dan guru dalam mencapai tujuan tertentu ketika tujuan tersebut dapat mengubah. Semua kegiatan pembelajaran tersebut tidak dapat terlaksana tanpanya Ada kerjasama antara siswa dan guru karena setiap orang mempunyai tugasnya masing-masing termasuk menjadi guru tidak hanya menjelaskan materi yang akan disampaikan tetapi Guru juga harus mampu mengendalikan dengan baik situasi di kelas, begitu juga dengan siswa lainnya. Dengan memperhatikan materi yang disampaikan guru, siswa harus lebih aktif dan mempunyai kreativitas dalam belajar, dan juga semangat sosial yang sangat tinggi terhadap kegiatan belajar yang pastinya akan lebih menyenangkan dan tidak membosankan.

Guru mempunyai peran sebagai pengelola pembelajaran, mengembangkan suatu materi pembelajran dengan baik, bertindak sebagai seorang fasilitator dengan upaya menciptakan pembelajaran yang efektif dan meningkatkan keterampilan siswa untuk mendengarkan pelajaran sehingga mereka dapat menguasai konsep-konsep tujuan pendidikan yang harus mereka capai.

Peran guru dalam kehidupan untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap nilai-nilai pancasila di era globalisasi saat ini sangat diperlukan karena

dalam penerapan nilai-nilai pancasila dapat mempengaruhi keadaan mental siswa dan akademi sebagai basis negara itu tidak datang dari hasil pendapat orang lain atau negara lain, melainkan pancasila benar-benar terlihat jiwa, kesadaran negara kita, negara Indonesia. Contoh nilai-nilai pancasila bagi pelajar termasuk menjaga kebersihan sekolah, dengan mempertahankan siswa yang memiliki kebersihan, Praktek Pancasila dari guru Pancasila di sekolah.

Guru menjadi salah satu peran penting dalam penanaman nilai-nilai pancasila dalam diri peserta didik. Guru sebagai pendidik tentunya harus mampu memberikan peran penting untuk menciptakan sikap toleransi dan menghargai perbedaan antar sesama untuk mencegah adanya sikap radikalisme terutama dalam diri peserta didik. Penanaman nilai-nilai pancasila dalam diri peserta didik menjadi salah satu cara untuk mencegah adanya sikap radikalisme, dalam penanaman nilai-nilai pancasila peserta didik akan ajarkan tentang sikap toleransi dan menghargai adanya keberagaman.

Suharjo (2006: 60) mengemukakan bahwa guru sekolah dasar memiliki beberapa tugas yaitu tugas profesional, kemanusiaan dan tugas sosial. Tugas profesional seorang guru yaitu untuk mendidik, mengajar, dan melatih siswa untuk mengembangkan pengetahuan siswa dan keterampilan. Sedangkan tugas mendidik merupakan yang diemban oleh guru di sekolah dasar dalam rangka mempersiapkan peserta didik dengan memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan nilai dan moral. Begitu juga dengan tugas guru sebagai kemanusiaan berarti guru adalah orang tua kedua siswa ketika mereka berada di sekolah. Sebagai orang tua harus mendidik anaknya, begitu juga guru harus menganggap siswa sebagai anaknya sendiri dan memberikan pengajaran dan pendidikan yang

baik kepada peserta didik. Guru memiliki kewajiban mendidik peserta didik supaya memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tugas berikutnya adalah adalah guru memiliki tugas sosial, yang artinya sebagai guru bertugas untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik dan dapat diterima di lingkungan masyarakat maupun berbangsa dan negara.

Pada saat kegiatan pembelajaran guru harus mampu membuat situasi kelas yang kondusif dan menyampaikan materi dengan baik, guru tidak boleh membeda-bedakan antara murid yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, seperti mendidik, mengajar, melatih dan mengimplementasikan (Afdal & Spernes, 2018). Mendidik merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang guru mengarahkan siswa dalam hal positif termasuk akhlak yang baik, kemudian mengajar yaitu proses kegiatan yang dilakukan seorang guru agar tujuan bisa tercapai, dan yang terakhir adalah mengimplementasikan yaitu merapkan hal positif dalam kehidupan sehari-hari (Rahayuningsih, 2022). Sikap dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, seperti halnya dengan mengikuti bakti sosial maupun acara lain disekolah, serta mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan serta memiliki sikap saling menghormati satu sama lain (Rianto, 2016).

Terakhir adalah berani membela kebenaran dan keadilan, tidak berupa kejahatan saja melainkan bisa berupa hak dan kewajiban sebagai masyarakat (Rusmiati & Saleky, 2018).

Pada kegiatan ini tidak hanya Guru saja untuk menimplementasikan nilai-nilai Pancasila tetapi juga harus diterapkan oleh kepala sekolah, staf sekolah seperti bagian kurikulum, bagian kesiswaan, tata usaha, satpam, tukang kebun dan

lain sebagainya (Fatimah & Dewi, 2021). Banyak sekali cara untuk mengimplementasikan sila-sila pada Pancasila yang khususnya pada sila ke lima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan cara pada proses pembelajaran berlangsung, seperti kerja kelompok, serta kegiatan sosial yang ada di sekolah, yang kemudian berdampak positif bagi siswa dan masyarakat sekolah (Ismail, Suhana, & Zakiah, 2021).



## 2.5 Penelitian Yang Relevan

**Tabel 1. Penelitian Relevan**

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Penerapan Nilai Pancasila Dalam Proses Pembelajaran Di Sekolah Dasar	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar dijumpai kendala bahwa masih ada beberapa anak yang sulit dinasihati serta ada anak yang memiliki kebiasaan di luar sekolah yang kurang baik kemudian terbawa ke sekolah. Karena itu, seyogyanya sekolah harus mampu mengatasi kendala tersebut dengan terus melakukan pembiasaan, bimbingan, dan pembinaan kepada siswa serta menjalin kerjasama yang baik (sinergis) antara pihak sekolah dengan orangtua mereka.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah penelitian terdahulu meneliti bagaimana penerapan nilai pancasila dalam proses pembelajaran di Sekolah Dasar sedangkan penelitian ini ingin melihat bagaimana implementasi pancasila di sekolah dasar tersebut dijalankan apakah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah atau belum.
2.	Analisis kebijakan Penguatan pendidikan karakter dalam mewujudkan pelajar pancasila di sekolah	Kualitatif	Upaya dalam mencapai tujuan pendidikan karakter tersebut tentang Prestasi Siswa pancasila sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim	Perbedaan penelitian saat ini ialah penelitian terdahulu lebih berfokus mengenai kebijakan yang di lakukan pemerintah mengenai pembelajaran pancasila sedangkan penelitian saat ini berfokus pada

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			<p>mengatakan penguatan Pendidikan karakter siswa tersebut dapat dicapai melalui kebijakan yang berbeda-beda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang fokus pada upaya pencapaian siswa Pancasila. Yang dimaksud dengan pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki keterampilan. di seluruh dunia dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: iman, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, keberagaman global dan gotong royong penalaran kolaboratif, mandiri, kritis dan kreatif.</p>	<p>implementasi pancasila yang sudah dirancang oleh pemerintah.</p>
3.	Implementasi Nilai Pancasila sebagai Upaya Penanaman Pendidikan Karakter pada Siswa Sekolah Dasar	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian SDN 1 Sekarsuli mencoba melakukan Nilai-nilai sila I sampai V. Sekolah menerapkan nilai-nilai pancasila	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah penelitian terdahulu berfokus pada implementasi pancasila sebagai upaya penanaman

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			<p>dalam berbagai kegiatan pembelajaran, baik dalam kegiatan di dalam maupun di luar kelas. Penerapan nilai – nilai pancasila tercermn dalam hubungan sehari – hari antar anggota sekolah. Guru dengan guru, guru dengan siswa, dan juga siswa dengan siswa lainnya. Penerapan nilai – nilai pancasila di sekolah sepertinya tidak sulit dilakukan oleh guru dan siswa.</p>	<p>pendidikan karakter sedangkan penelitian saat ini lebih berfokus pada implementasi peraturan pemerintah mengenai pancasila.</p>
4.	Implementasi Nilai – Nilai Pancasila Dalam kegiatan Pembelajaran Di SDN 1 Sekarsuri	Kualitatif	<p>Di SD Negeri Bakulan penerapan pendidikan nilai dilakukan untuk membantu siswa dalam memahami nilai – nilai moral. Pendidikan nilai yang diterapkan bertujuan untuk membentuk kepribadian individu sesuai dengan nilai – nilai pancasila yang ada. Selain itu juga guna untuk memberikan pegetahuan kepada siswa mengenai suatu tindakan yang baik atau buruk.</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah penelitian terdahulu memiliki lokasi penelitian berada di kabupaten Daerah Istimewah Yogyakarta sedangkan penelitian di kabupaten Deliserdang Sumatera Utara.</p>



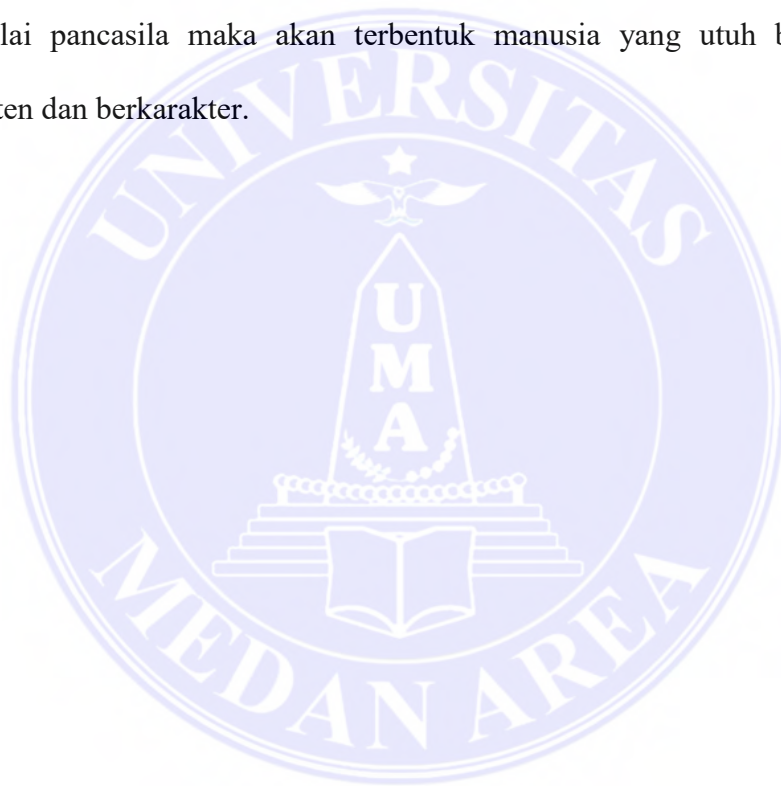
No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
5.	Implementasi Pendidikan Pancasila di SD Negeri Bakulan	Kualitatif		Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah penelitian terdahulu melakukan penelitian di SD Negeri bakulan sedangkan penelitian saat ini dilakukan di SD Negeri 104212.

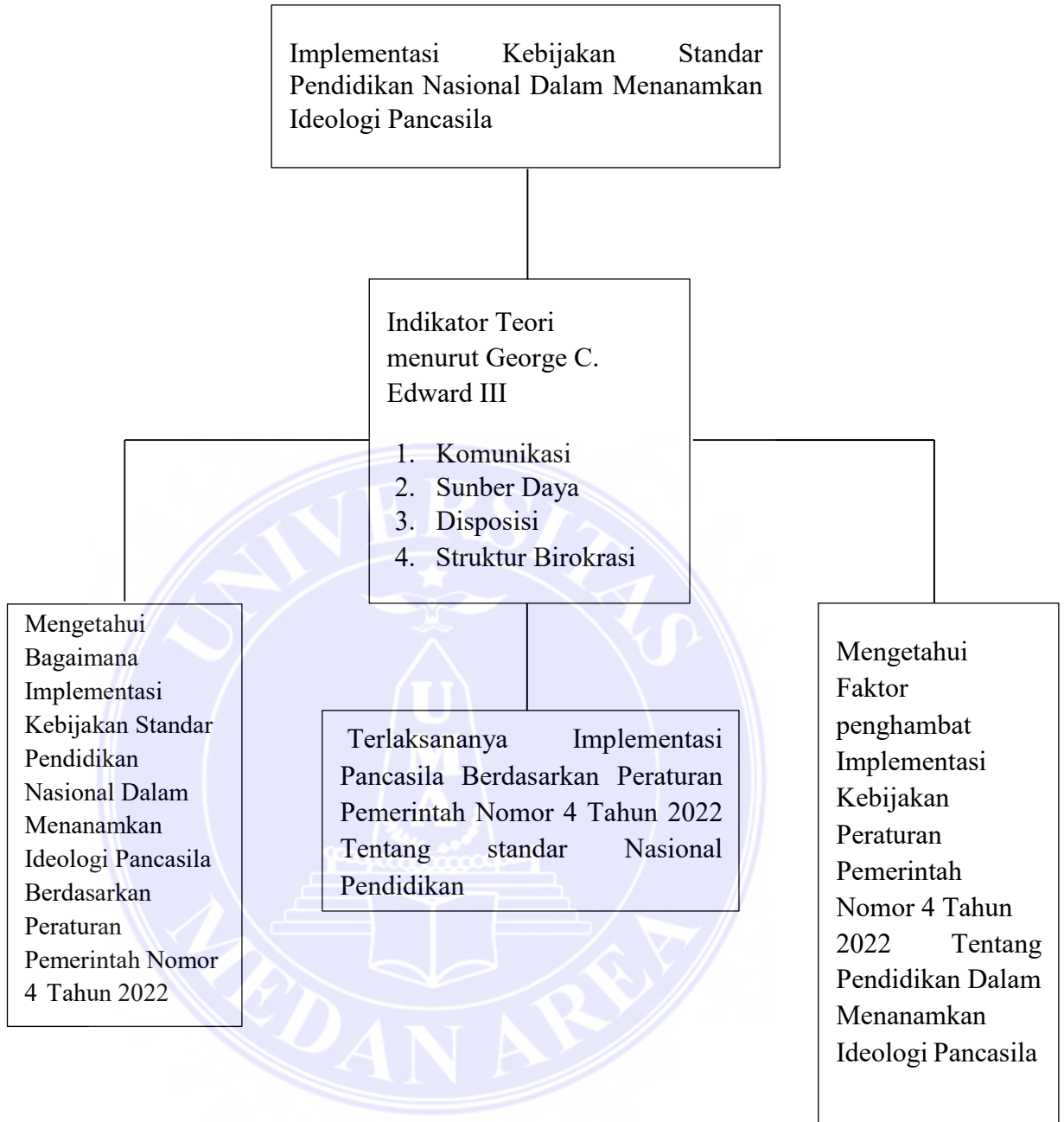
## 2.6 Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan yang berguna untuk membangun karakter dan keterampilan siswa dalam melakukan kegiatan pendidikan. Secara filosofis, pembentukan karakter melalui pendidikan karakter dibutuhkan dan perlu diberikan pada peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan bangsa. Profil Pancasila yang dimiliki peserta didik berperan sebagai simbol siswa Indonesia yang berbudaya, berkarakter, serta memiliki nilai-nilai Pancasila (Rosmana et al., 2022).

Implementasi pemahaman ideologi pancasila pada anak sekolah dasar dapat diajarkan melalui pengajaran nilai-nilai seperti kerjasama, saling menghormati, dan tanggung jawab, yang diterapkan dalam kegiatan belajar kelompok, permainan, dan upacara bendera, sehingga anak-anak memahami pentingnya hidup dalam kebersamaan dan saling menghargai sejak dini. Sebagai suatu lembaga pendidikan anak sekolah dasar harus mampu dalam memberikan kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan serta harapan dari masyarakat. Salah satu contohnya yaitu dapat mengajarkan serta menanamkan pemahaman ideologi pancasila baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah.

Penerapan nilai-nilai pancasila dalam proses pembelajaran melalui pendidikan nasional pada hakikatnya adalah untuk mengembangkan keterampilan serta membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, menuju pembangunan potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Diharapkan dengan menerapkan nilai-nilai pancasila maka akan terbentuk manusia yang utuh berpendidikan, kompeten dan berkarakter.





Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia. Penelitian kualitatif biasanya mengumpulkan data dalam bentuk deskripsi, cerita atau wawancara dan tidak mengandalkan angka atau statistik. Tujuannya untuk menggali makna, pengalaman dan sudut pandang terhadap subjek yang dipelajari.

Penelitian kualitatif memiliki tujuan yang lebih dalam dalam pengimplementasiannya. Tujuan penelitian kualitatif dibagi menjadi tiga menggambarkan objek penelitian, mengungkapkan makna dari fenomena, dan menjelaskan fenomena. Adapun tujuan-tujuan tersebut diantaranya yaitu:

1. Menggambarkan objek penelitian

Hal ini diperlukan agar objek penelitian dapat lebih mudah dipahami representasi penelitiannya. Yang dilakukan dengan cara pengambilan gambar, video, ilustrasi dan narasi secara verbal maupun non-verbal. Representasi dibuat terhadap objek yang berupa peristiwa, interaksi sosial, kegiatan sosial, dan lainnya.

2. Mengungkapkan fakta dari fenomena

Makna dari setiap fenomena dapat diungkapkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi partisipatif (*participation observation*).

### 3. Menjelaskan fenomena

Fenomena perlu dijelaskan secara detail, rinci, dan sistematis untuk menghindari kesalahan konsepsi, kesalahpahaman, dan kesalahan interpretasi.

Penelitian kualitatif juga dapat dilihat sebagai penelitian yang memiliki desain penelitian fleksibel atau dapat disesuaikan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Pemahaman menyeluruh terhadap teori penelitian kualitatif merupakan syarat mutlak. Penelitian kualitatif juga berkaitan dengan gagasan, persepsi, pendapat atau keyakinan orang yang diteliti dan tidak semua bisa diukur dengan angka. Lewat penelitian ini, penulis ingin menggambarkan secara menyeluruh mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Menanamkan Pemahaman Ideologi Pancasila Bagi Pelajar (SDN 104212) Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SDN 104212 yang beralamat di Jalan Balai Desa Marindal II, Desa Patumbak Satu, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu karena SDN 104212 merupakan lembaga pendidikan dasar negeri yang berdedikasi tinggi dalam mencetak generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia. Selain itu juga SDN 104212 memiliki tenaga pendidik yang berkualitas sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

### 3.3 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini berdasarkan tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1

bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

Tabel 2. Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Okt 2024	Nov 2025	Des 2024	Feb 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025
1.	Penyusunan Proposal								
2.	Seminar Proposal								
3.	Perbaikan Proposal								
4.	Pelaksanaan Penelitian								
5.	Penyusunan Skripsi								
6.	Seminar Hasil								
7.	Revisi Skripsi								
8.	Sidang Meja Hijau								

### 3.4 Informan Penelitian

Menurut Afrizal (2016: 170) informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam.

Penelitian kualitatif tidak dikenal dengan istilah sampel. Sampel pada penelitian kualitatif disebut informan. Menurut Sugiyono (2014: 219) Informan adalah orang-orang yang dipilih untuk diwawancara atau diobservasi sesuai tujuan penelitian. Informan ini diharapkan juga dapat memberikan informasi, data, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Adapun informan-informan tersebut diantaranya adalah:

#### 1. Informan Kunci

Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi dasar yang diperlukan dalam suatu penelitian ataupun informan yang mengetahui kedalaman masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini informan kunci nya Ibu Rosna Herawati sormin, S.Pd adalah kepala sekolah SDN 104212.

## 2. Informan Utama

Informan utama adalah orang yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti. Mereka biasanya memiliki pengetahuan, pengalaman, atau posisi yang membuat mereka sangat relevan untuk topik yang sedang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah guru Kelas V yaitu Ibu Endang Sari Tanjung, S.Pd., Gr. SDN 104212 dan Ardiansyah Pohan, S.Kom selaku TU di SDN 104212.

## 3. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah orang yang memberikan informasi atau sudut pandang tambahan yang mendukung atau melengkapi data yang diperoleh dari informan utama. Pengetahuan mereka mungkin tidak sedalam informan kunci, namun mereka tetap relevan dengan konteks penelitian. Informan tambahan dapat membantu memperluas pengetahuan, memberikan perspektif berbeda, dan memperkaya analisis dengan perspektif berbeda. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah 5 siswa-siswi yang ada di SDN 104212 yaitu Sarah Calista Simanjutak, Muhammad Al Hafiz, Maelica Gici Paulina Kesek, Tristan Matheus Purba, Putri Dinarsyah.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018:224) teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti secara

langsung mengamati perilaku, peristiwa, atau fenomena di lingkungan alami mereka. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang subjek yang diteliti tanpa mengintervensi atau mempengaruhi situasi tersebut. Observasi penelitian ini melihat dan mengamati langsung bagaimana implementasi Pancasila di SDN 104212 berlangsung.

Kegiatan Observasi ke SDN 1041212 dilakukan untuk mengetahui Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Observasi ini melibatkan wawancara dengan guru dan siswa serta pengamatan langsung terhadap kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Peneliti tentunya mengamati secara langsung objek yang diteliti, mencatat, dan mengidentifikasi serta menganalisis data untuk membuat kesimpulan.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dimana peneliti berinteraksi secara langsung dengan individu atau kelompok untuk memperoleh informasi, pendapat atau pengalamannya mengenai suatu topik tertentu. Wawancara dapat bersifat formal atau informal dan dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon atau online. Dalam hal ini sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu menyiapkan pedoman wawancara guna memperoleh informasi seputar implementasi Pancasila di sekolah tersebut.

Kegiatan wawancara di SDN 104212 dilakukan untuk menggali informasi lebih lanjut tentang Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari di sekolah dasar tersebut. Wawancara ini melibatkan guru, siswa, dan kepala sekolah sebagai narasumber. Pertanyaan yang diajukan meliputi Implementasi Pancasila, kegiatan ekstrakurikuler, dan kehidupan sehari-hari di sekolah.



### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, penyimpanan dan pengorganisasian informasi atau data dalam bentuk tertulis, gambar, audio atau video. Data-data yang dikumpulkan melalui teknik observasi merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi tersebut. Dokumentasi juga merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Peneliti mengambil dokumentasi berupa kegiatan serta pembelajaran mengenai implementasi pancasila di SDN 104212.

Kegiatan dokumentasi di SDN 104212 dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi tentang implementasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Dokumentasi ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti data dan jumlah keseluruhan siswa-siswi serta guru dan laporan kegiatan siswa. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pancasila di sekolah dasar tersebut.

#### 3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses menginterpretasikan dan memahami data yang dikumpulkan melalui metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk menemukan pola, tema, atau makna yang dapat memberikan wawasan tentang fenomena yang diteliti. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:334) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion*

*drawing/verification.*

## 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyaring dan menyederhanakan data yang dikumpulkan dalam penelitian sehingga dapat diketahui informasi yang penting dan relevan dengan lebih jelas. Dalam konteks penelitian kualitatif, reduksi data membantu peneliti fokus pada tema atau pola utama yang muncul dari data, sehingga menghilangkan informasi yang tidak relevan atau berlebihan. Dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti ialah melakukan pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi, dan pengamatan di SDN 104212.

Melalui reduksi data, peneliti dapat memperoleh data yang lebih fokus dan relevan dengan topik penelitian. Data yang telah direduksi kemudian dapat dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pancasila di sekolah dasar tersebut dan apa saja tantangan yang dihadapi. Kemudian, hasil reduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan di sekolah dasar.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif merupakan cara penyampaian hasil dan analisis kepada khalayak secara jelas dan mudah dipahami. Tujuannya adalah mendeskripsikan temuan penelitian secara komprehensif sehingga pembaca memahami konteks, makna, dan implikasi data yang dikumpulkan. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:339) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Penyajian data merupakan salah satu tahapan paling penting dalam analisis

data. Penyajian data dilakukan untuk mempresentasikan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Penyajian data yang efektif dapat membantu pembaca memahami hasil penelitian dengan lebih baik dan data yang disajikan dapat berupa kegiatan siswa yang mendukung nilai-nilai Pancasila.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kemudia langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:343) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

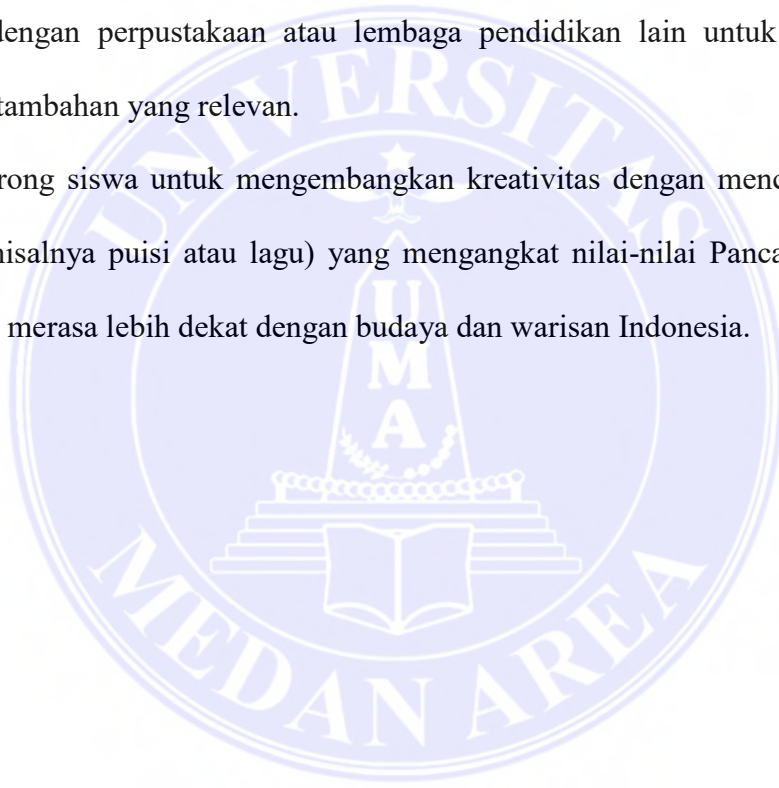
Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dijabarkan melalui hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Pancasila di SDN 104212 sudah berjalan dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan berbagai aspek seperti komunikasi yang baik antara guru dengan guru serta guru dengan murid dan dilakukannya kebiasaan 3S (senyum, salam, sapa) serta adanya tempelan dinding berupa isi serta makna dari pancasila. Dalam aspek sumber daya belum berjalan dengan baik dilihat dari masih adanya kendala dalam anggaran sehingga menghambat pelaksanaan implementasi pancasila termasuk dalam pembelian buku, struktur organisasi sudah terstruktur dalam kegiatan P5 dengan tanggung jawab masing-masing fase dalam kegiatannya sehingga kegiatan dapat berjalan secara rutin, serta disposisi yang baik dari pihak kepala sekolah, guru, maupun siswa-siswi sehingga dapat mengintegrasikan pancasila di kehidupan sehari-hari.
2. Faktor penghambat Implementasi Pancasila di SDN 104212 yaitu kurangnya tingkat penalaran siswa dalam memahami konsep-konsep nilai-nilai pancasila, kurangnya ketersediaan buku sehingga menghambat proses pembelajaran, dan pengaruh globalisasi yang membuat siswa lebih menikmati lagu POP dibanding menghayati lagu nasional dan daerah.

#### **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan dan sampaikan terkait dengan implementasi Pancasila di SDN 104212 Marindal II yaitu:

1. Bagi pihak SDN 104212 untuk meningkatkan implementasi dalam menanamkan ideologi pancasila Guru dapat menggunakan metode yang lebih menarik dan interaktif untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila, misalnya dengan menggunakan permainan edukatif atau kegiatan berbasis proyek yang melibatkan siswa secara langsung.
2. Menambah sumber daya belajar, seperti buku yang berkualitas tentang Pancasila, dan media pembelajaran digital yang bisa diakses oleh siswa. Sekolah bisa bekerja sama dengan perpustakaan atau lembaga pendidikan lain untuk menyediakan materi tambahan yang relevan.
3. Mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas dengan menciptakan karya seni (misalnya puisi atau lagu) yang mengangkat nilai-nilai Pancasila, sehingga mereka merasa lebih dekat dengan budaya dan warisan Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.

Dwidjowijoto, R. N. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Gramedia.

Hasbullah, H. M. (2015). *Kebijakan Pendidikan; Dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jones, C. O. (2001). *An Introduction to The Study Public Policy*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Madani, M. (2011). *Dimensi interaksi aktor dalam proses perumusan kebijakan publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muda, I. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Medan: Medan Area University Press.

Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharjo. (2006). *Mengenal Pendidikan Sekolah Dasar Teori dan Praktek*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagakerjaan.

Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan I*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

## Jurnal

Afdal, H. W., & Spernes, K. (2018). Designing and redesigning research-based teacher education. *Teaching and Teacher Education*, 74, 215–228.

Fatimah, S., & Dewi, D. A. (2021). Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter jati diri anak bangsa. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(3), 70–76.

Ismail, S., Suhana, S., & Zakiah, Q. Y. (2021). Analisis kebijakan penguatan pendidikan karakter dalam mewujudkan pelajar pancasila di sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 76–84.

Kurniawati, B. (2022). Penerapan Nilai Pancasila dalam Proses Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Jurnal Jagadhdhita*, 1(2).

Pebriani, N. P. I., Putrayasa, I. B., & Margunayasa, I. G. (2022). Pengembangan E-LKPD berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skill) dengan pendekatan saintifik pada pembelajaran IPA tema 8 kelas V SD. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan Indonesia*, 12(1), 76–89.

Rahayuningsih, P. (2022). Fungsi dan Peran Media Pembelajaran Sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Belajar Siswa. *JPIB: Jurnal Penelitian Ibnu Rusyd*, 1(1).

Rianto, H. (2016). Implementasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab di lingkungan sekolah. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 3(1), 80–91.

Rosmana, P. S., Iskandar, S., Fauziah, H., Azzifah, N., & Khamelia, W. (2022). Kebebasan dalam kurikulum prototype. *As-Sabiqun*, 4(1), 115–131.

Rusmiati, R., & Saleky, A. P. (2018). Peran Guru Mata Pelajaran Pkn Dalam Proses Implementasi Pendidikan Karakter Pada Siswa. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 79–89.

Septiani, I., Apriani, A.-N., & Izzah, L. (2022). Implementasi Pendidikan Pancasila di SDNegeri Bakulan. *Indonesian Journal of Elementary Education and Teaching Innovation*, 1(2), 33–42.

Suneki, S. (2012). Dampak globalisasi terhadap eksistensi budaya daerah. *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1).

Wahyono, I. (2018). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pembelajaran di SDN 1 Sekarsuli. *Basic Education*, 7(2), 124–130.

Yasila, K., & Najicha, F. U. (2022). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah pluralitas masyarakat indonesia. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 14–20.

Zhahira, M. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Upaya Penanaman Pendidikan Karakter pada Siswa Sekolah Dasar. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(3), 79–85.

### **Undang-undang**

*Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan.*





## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI PENELITIAN

Dokumentasi dengan Kepala Sekolah SDN 104212 Ibu Rosna Herawati sormin,  
S.Pd



Dokumentasi dengan Guru Kelas V SDN 104212 Ibu Endang Sari Tanjung, S.Pd.,  
Gr.



### Dokumentasi dengan TU SDN 104212 Bapak Ardiansyah Pohan, S.Kom



### Dokumentasi dengan Siswa-siswi yang ada di SDN 104212



### Dokumentasi Spanduk Profil Pelajar Pancasila



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Pedoman Wawancara Untuk Informan Kunci ( Kepala Sekolah SDN 104212 )**

#### **1. Komunikasi**

- a) Bagaimana sekolah Bapak/Ibu menyampaikan pentingnya penerapan nilai-nilai
- b) Pancasila dalam pembelajaran kepada seluruh tenaga pendidik dan siswa di sekolah?
- c) Apakah ada komunikasi yang jelas mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila seharusnya diimplementasikan dalam setiap kegiatan belajar mengajar, baik dalam kurikulum maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler?

#### **2. Sumber Daya**

- a) Sejauh mana sumber daya yang ada di sekolah (seperti materi, pelatihan, dan fasilitas) mendukung upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran sehari-hari?
- b) Apakah sekolah sudah memiliki materi pembelajaran khusus yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap mata pelajaran, ataukah masih perlu pengembangan lebih lanjut?
- c) Bagaimana sekolah memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti waktu, anggaran, dan tenaga pendidik, untuk memastikan bahwa nilai Pancasila ditanamkan secara konsisten dalam kegiatan belajar mengajar?

#### **3. Struktur Organisasi**

- a) Bagaimana struktur organisasi di sekolah mendukung implementasi PP No. 4 Tahun 2022 dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila? Apakah ada tim khusus atau kebijakan yang melibatkan seluruh pihak sekolah dalam proses ini?
- b) Apakah ada program atau kebijakan spesifik yang dikembangkan di tingkat sekolah untuk mendukung penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah?

#### **4. Disposisi**

- a) Sejauh mana Bapak/Ibu sebagai kepala sekolah merasa memiliki komitmen terhadap penanaman nilai Pancasila dalam pendidikan?
- b) Bagaimana Bapak/Ibu memotivasi guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk mendukung implementasi kebijakan ini?

### **Pedoman Wawancara Untuk Informan Utama ( Ibu Endang dan Bapak**

Ardiansyah Pohan)

1. Komunikasi

- a) Bagaimana Bapak/Ibu mengkomunikasikan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila kepada siswa melalui mata pelajaran Kewarganegaraan?
- b) Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menyampaikan pesan tentang penanaman nilai Pancasila kepada siswa dan bagaimana cara mengatasinya?

2. Sumber Daya

- a) Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa materi ajar dan sumber daya yang tersedia di sekolah sudah cukup untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 4 Tahun 2022?
- b) Bagaimana Bapak/Ibu memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti buku teks, alat bantu pembelajaran, atau teknologi, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran Kewarganegaraan?
- c) Apakah ada pelatihan atau dukungan dari sekolah untuk meningkatkan kapasitas Bapak/Ibu dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila?

3. Struktur Organisasi

- a) Sejauh mana kepala sekolah dan manajemen sekolah mendukung Bapak/Ibu dalam penerapan nilai Pancasila dalam setiap kegiatan pembelajaran?
- b) Apakah ada kebijakan atau program khusus yang diterapkan di sekolah untuk mendukung penguatan nilai Pancasila dalam pembelajaran Kewarganegaraan?

4. Disposisi

- a) Bagaimana Bapak/Ibu melihat disposisi (sikap) siswa terhadap pembelajaran yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila? Apakah mereka menunjukkan ketertarikan dan pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai tersebut?
- b) Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa ada tantangan dalam membentuk sikap positif siswa terhadap penerapan nilai Pancasila? Bagaimana Bapak/Ibu mengatasi tantangan tersebut?

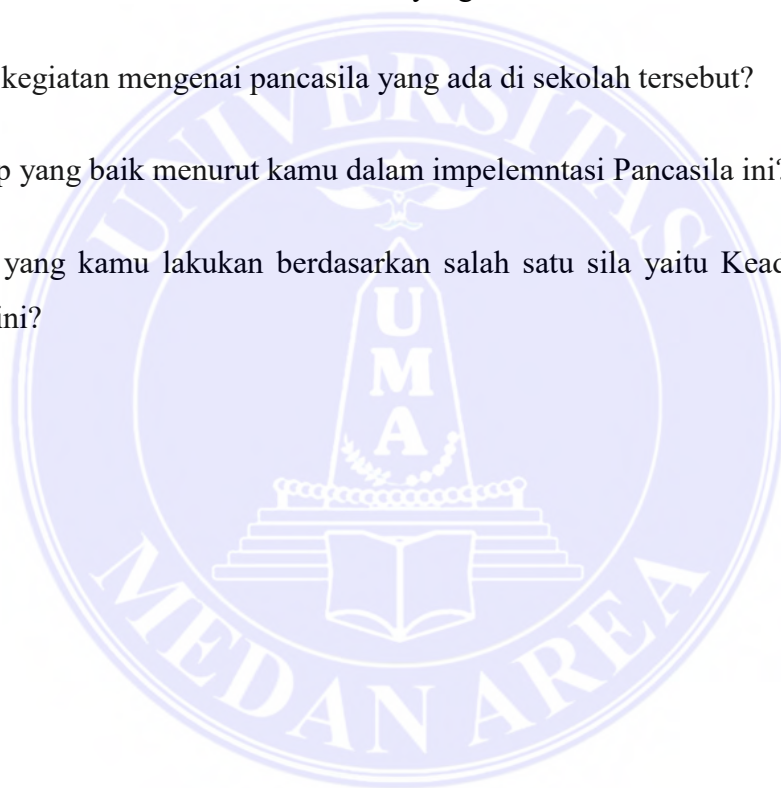
Pedoman wawancara kepada Informan Tambahan (siswa-siswi SDN 104212)

1. Apa kamu tahu apa itu nilai-nilai Pancasila? Bisa sebutkan contohnya?
2. Kegiatan apa saja di sekolah yang menurutmu menunjukkan sikap sesuai dengan Pancasila?

3. Apakah sekolah memiliki program khusus untuk membentuk karakter siswa berdasarkan nilai Pancasila?
4. Apa saja kegiatan rutin di sekolah yang berkaitan dengan penguatan Profil Pelajar Pancasila?
5. Bagaimana kamu dan teman-teman menunjukkan sikap saling menghargai di kelas?

Pedoman Wawancara Untuk Informan Tambahan (5 Siswa-siswi SDN 104212)

1. Bagaimana kebiasaan dalam komunikasi yang dilakukan di sekolah SDN 104212?
2. Apa saja kegiatan mengenai pancasila yang ada di sekolah tersebut?
3. Apa sikap yang baik menurut kamu dalam impelemntasi Pancasila ini?
4. Hal apa yang kamu lakukan berdasarkan salah satu sila yaitu Keadilan Sosial di sekolah ini?



## Surat Izin Penelitian



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 193/FIS.2/01.10/I/2025 Medan, 22/01/2025  
Lampiran. : -  
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth.  
Kepala Sekolah SDN 104212 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang  
Di Tempat

Dengan hormat,  
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Vini Argianti  
NIM : 218520029  
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada SDN 104212 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

*“ Implementasi Peraturan Pemerintah no.4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Menanamkan Ideologi Pancasila Bagi Pelajar SDN 104212 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara”*

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dekan



Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.I.P

Tembusan:

1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

## Surat Hasil Riset



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DINAS PENDIDIKAN  
**UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SDN 104212**  
Jalan Balai Desa Pasar XII Marindal II Kode Pos 20361  
Telp. 085236047918

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 422 / 50 / II / SD-12 / 2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ROSNA HERAWATI SORMIN, S.Pd**  
NIP : 19700919 2008 01 2024  
Pangkat/GOL : Pimbina / IV.a  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit Kerja : UPT SPF SD Negeri No. 104212 Marindal II Kec. Patumbak

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Vini Argianti  
NIM : 218520029  
Jurusan : Administrasi Publik

Menerangkan nama mahasiswa Universitas Medan Area di atas Telah Melaksanakan Penelitian Sesuai dengan Surat Permohonan dari UMA No : 193/FIS.2/01.10/1/2025 Terhitung Mulai Tanggal 31 Januari-20 Februari 2025 dengan Judul Skripsi "Implementasi Peraturan Pemerintah no.4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Menanamkan Ideologi Pancasila Bagi Pelajar SDN 104212 Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Demikian Surat keterangan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Patumbak, 20 Februari 2025



**ROSNA HERAWATI SORMIN, S.Pd**  
NIP. 19700919 2008 01 2024

LAMPIRAN ISI PP NO.4 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR NASIONAL  
PENDIDIKAN



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021  
TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu menegaskan Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan tinggi;
- c. bahwa pengaturan mengenai badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan perlu diselaraskan dengan mekanisme akreditasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

**Mengingat: . . .**





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A . . .

**SK No 010989 A**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**Pasal 1A**

Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini.
- (2) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup:
  - a. nilai agama dan moral;
  - b. nilai Pancasila;
  - c. fisik motorik;
  - d. kognitif;
  - e. bahasa; dan
  - f. sosial emosional.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar difokuskan pada:
  - a. persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;

b. penanaman . . .

**SK No 010990 A**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/3/26  
82